

Relasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Masyarakat dan TNI - Polri dalam Pandangan Antropologi Kepolisian

Bakharuddin Muhammad Syah*

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

Email: bakharuddinms93@gmail.com

Abstrak

Aceh memiliki sejarah yang kaya akan kultur dan budaya, namun dalam sejarahnya juga tertulis berbagai peristiwa yang mengguncang masyarakat. Salah satunya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menarik perhatian tidak hanya masyarakat Indonesia, namun pemerintah dan pihak otoriter (TNI-Polri) juga. Gerakan Aceh Merdeka sudah dianalisis dan memiliki tinjauan literatur yang cukup banyak. GAM juga menjadi topik yang sering dilirik oleh para akademisi untuk menganalisa kejadian gerakan tersebut sebagai fenomena sosial. Dalam penelitian ini, para penulis mendekati GAM sebagai fenomena antropologi kepolisian melalui lensa teori tersebut. Untuk membandingkan dengan studi lainnya, penulis juga mengumpulkan berbagai literatur sebagai landasan analisis dan serta untuk menjadi instrumen memperkuat argumen.

Kata Kunci: Gerakan Aceh Merdeka (GAM); Antropologi Kepolisian; TNI-Polri

Abstract

Aceh has a rich history of culture, but its history is also filled with events that shook the society. One of them is the Free Aceh Movement (GAM), which attracted the attention of not only the Indonesian people, but also the government and authoritarian parties (TNI-POLRI). The Free Aceh Movement has been analyzed and has a considerable literature review. GAM is also a topic that is often looked at by academics to analyze the events of the movement as a social phenomenon. In this paper, the authors approach GAM as an anthropological policing phenomenon through the lens of the theory. To compare with other studies, the authors also collected various literatures as a basis for analysis and as an instrument to strengthen the argument.

Keywords: Free Aceh Movement (FAM); Police Anthropology; TNI-Polri

Pendahuluan

Tulisan dari Schulze (2003) mengkaji secara mendalam GAM, pendirian dan ideologi organisasi tersebut serta strukturnya, basis pendukungnya, dan pada akhirnya strategi politik-militernya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang gerakan liberal nasional dan sifat perjuangannya serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika dialog politik sejak tahun 2000. Dengan menelusuri sejarah dan

How to cite:	Bakharuddin Muhammad Syah (2024) Relasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Masyarakat dan TNI - Polri dalam Pandangan Antropologi Kepolisian, (5) 5
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

ideologi GAM, serta menganalisis tingkat faksionalisasinya, kapasitas dan strateginya menjelaskan GAM secara ideologis, psikologis, dan organisasi / struktural untuk tujuan kemerdekaan dipengaruhi beberapa faktor, pertama narasi sejarah dan ideologi yang menghalangi kompromi, kedua adanya perpecahan dalam organisasi yang pada masa lalu telah melemahkan potensi kesepakatan dan menyimpan bibit perselisihan internal (Wulandari, Mahyuzar, & Si, 2019);(Kumalasari, 2021);(Nurhasim, 2016).

Ketiga, tingkat kapasitas paramiliter yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Sinaga, 2018). Keempat, strategi politik - militer yang tidak menghalangi gencatan senjata taktis atau perjanjian sementara sebagai langkah pertama proses dekolonisasi (Mahardika, 2015). Ideologi dan retorika GAM telah mengalami sejumlah perubahan sejak berdirinya GAM pada tahun 1976. Tujuan utamanya adalah mewujudkan negara Aceh yang merdeka (Shindyawati, 2019);(Syaftina, 2018);(Hidayat, Herdiansyah, & Sumadinata, 2021). Sebagaimana disampaikan oleh di Tiro, bahwa Ideologi GAM adalah nasionalisme dan pembebasan nasional Aceh atau sebagai upaya untuk membebaskan rakyatku dari dominasi asing / kolonialisme Jawa.

Senada namun ditulis dalam pandangan berbeda, bahwa pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dibawah pimpinan Daud Beureuh, beberapa orang Aceh memutuskan untuk memberontak kepada Jakarta pada awal tahun 1950-an karena dikecewakan oleh beberapa kebijakan yang diterapkan di Pusat. Pada tahun 1970-an, Aceh begitu damai dan makmur di bawah pemerintahan sipil, dan tak ada seorang pun yang percaya bahwa, pada akhir dekade berikutnya, provinsi tersebut akan menjadi sebuah Daerah Operasi Militer (DOM) yang penuh kengerian.

Hasan Di Tiro tidak terlalu dianggap penting dikarenakan dia telah cukup lama meninggalkan Indonesia dan koneksinya kepada CIA / *Central Intelligence Agency* di masa lampau sebetulnya sudah kadaluarsa. namun ketika “Aceh Merdeka” menjadi populer di akhir tahun 1980-an dikarenakan banyaknya orang Aceh yang tidak percaya dengan manusia Indonesia yang lain, kerakusan yang hebat dari Jakarta, ketidakadilan, penggantian pemimpin sipil putra daerah (dengan yang memiliki latar belakang militer yang kebanyakan berasal dari Jawa), semakin menegaskan bahwa yang dibutuhkan dari Aceh adalah sumber daya alam, bukan manusianya. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan relasional antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI - Polri dan Masyarakat dalam pandangan Antropologi Kepolisian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan observasi terlibat, wawancara dan studi kepustakaan (dokumen). Penelitian dilakukan pada waktu / periode awal tahun 2005 setelah bencana gempa bumi dan tsunami terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Latar sosial ekonomi juga mempengaruhi kondisi relasi konflik yang ada di antara GAM, TNI - Polri dan Warga masyarakat. Pada umumnya mata pencaharian warga masyarakat terletak pada sektor pertanian, nelayan dan sebagian kecil pegawai pemerintah, pedagang dan karyawan perusahaan yang berasal dari warga masyarakat non-Aceh. kondisi medan jalur / transportasi yang relatif sulit aksesnya membuat industri yang tidak berkembang kalau dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga sandang dan pangan masih relatif sulit terpenuhi.

Pendayagunaan tanah merupakan barang / sumber daya (pemenuhan kebutuhan) yang strategis karena dibutuhkan oleh semua warga masyarakat dari tahun ke tahun kebutuhan tanah semakin terbatas, sedangkan luas tanah bersifat relatif terbatas akibat benturan kepentingan yang membuat timbulnya permasalahan di bidang pertanahan diantaranya penyerobotan tanah, perambahan hutan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan tempat tinggal, sertifikat ganda, sertifikat palsu, mafia tanah, percaloan tanah dan ganti rugi yang tidak sesuai (Sinambela, 2021). Hutan di Aceh merupakan aset negara dan aset dari masyarakat yang memiliki nilai strategis sebagai modal dasar pembangunan sekaligus sebagai penentu ekosistem serta paru - paru dunia.

Nilai ini jelas dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Nilai dari komoditas ini selalu mengalami peningkatan dengan meningkatnya pembangunan, pemenuhan kebutuhan akan kayu dan hasil hutan ini mendorong orang tertentu memanfaatkan hutan tanpa mengindahkan pelestarian dan keindahan hutan. Kasus - kasus perusakan hutan akibat pencurian kayu hampir terjadi di seluruh wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) secara merata. Provinsi NAD memang memiliki industri besar seperti Minyak dan Gas Bumi, Gas alam cair / liquid natural gas (LNG), kertas, pupuk, semen, kayu lapis sebagai salah satu sumber devisa terbesar negara.

Pada masa reformasi dewasa ini muncul berbagai tanggapan segenap masyarakat NAD tentang kebijaksanaan pemerintah melalui Dana Bagi Hasil namun tetap saja menurut wacana propaganda yang berkembang oleh GAM ketidakadilan masih saja terjadi. Dari berbagai hal ini muncul wacana propaganda mendasar yakni kesenjangan sosial dan pandangan yang sempit terhadap pendatang/non Aceh hingga berkembang pada ancaman dan teror terhadap pendatang yang dilakukan oleh kelompok separatis GAM.

Dalam tulisan Schulze (2003), orang Aceh memandang betul perbedaan antara orang Aceh dan yang bukan-aceh secara khusus orang Jawa. "Orang Jawa sangat berbeda dengan kita. Mereka tidak pernah merdeka dalam catatan sejarah modern. Sekarang mereka kurang ajar datang ke sini dan menjajah kami setelah kami membantu mereka memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada perjuangan 1945-1949. Di era penjajahan sebelumnya Belanda memang adalah penjajah yang digantikan oleh penjajah Jawa yang baru. mereka mengecam eksploitasi negara, mencuri harta benda, merampas mata pencaharian, menyalahgunakan pendidikan anak - anak, mengasingkan para pemimpin

kami, dan telah menempatkan rakyat kami dalam belenggu tirani, kemiskinan dan penelantaran”.

Masyarakat Aceh memiliki ketakutan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena mereka takut kehilangan nyawanya, dan terkesan menutup-nutupi GAM. TNI / Polri bertujuan menyelamatkan rakyat aceh, namun padahal rakyat aceh yang sebetulnya menderita. GAM melakukan propaganda melalui dakwah / para ulama melalui sejarah Aceh yang banyak diperlakukan secara tidak adil oleh suku Jawa (bagian dari pemerintahan pusat). Kekecewaan rakyat Aceh melihat tindakan pemerintah terhadap Aceh misalnya ketika Sabang sebagai pelabuhan bebas dipindahkan ke Batam dan Aceh sebagai provinsi dijadikan karesidenan. Sehingga lambat laun masyarakat Aceh memiliki stereotip terhadap masyarakat luar Aceh (bukan-Aceh). Secara keterampilan, kemampuan berbahasa inggris, keuletan, membuat persepsi yang terbentuk semakin menegaskan batas - batas sosial antara Aceh dan Bukan-Aceh (Jawa).

Banyak anggota separatis GAM berusaha mempengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menumbuhkembangkan ideologinya kepada masyarakat Aceh dengan mencari dukungan dan simpatinya khususnya ketika Daerah Operasi militer di Aceh (Nurchaya & Dewi, 2021). Dahulu GAM juga melakukan propaganda yang mendiskreditkan Pemerintah terutama aparat keamanan (TNI/Polri). GAM kerap melakukan intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat khususnya bagi warga yang tidak mau bekerjasama dan membantu kegiatan yang berkaitan dengan GAM.

Tindakannya di lapangan seperti menculik atau membunuh warga masyarakat. “Kalau malam,kita tidak berani keluar. Kalau keluar siang pungg, kita was-was, apakah nanti di perjalanan kita akan mendapat halangan? Sekarang, di mana-mana kita jumpa dengan TNI, Brimob, bawa senjata siap tembak. Kita dekat dengan TNI/Polri takut ditandai GAM, dekat dengan GAM dihantam oleh aparat. Kami tidak bisa hidup tenang di dalam situasi saat ini”. Kebutuhan akan rasa aman rakyat di daerah ini terkait dengan situasi terakhir Banda Aceh yang ternyata dari hari ke hari terus berkembang menjadi wilayah konflik bersenjata yang terbuka.

Aksi-aksi pembakaran, penggranatan instansi pemerintah, dan kontak senjata antara GAM dan serdadu TNI dan Polri tinggi semakin tinggi intensitasnya dan semakin luas eskalasinya. Bahkan, tidak jarang aksi penculikan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil. Dan dalam kondisi seperti ini dari pihak aparat menuduh GAM dan pihak GAM mengklaim aparat menembak masyarakat. Kondisi ketidakamanan ini dipandang oleh mereka sudah mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Kondisi ketidakamanan dipandang dapat mengancam upaya-upaya damai dalam masyarakat sipil dalam mengkampanyekan berbagai bentuk dan rentetan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Aceh. Paling tidak, semakin tidak aman, maka semakin tertutup ruang publik untuk berdemokrasi dan semakin tiada artinya manusia.

Kebutuhan akan rasa aman juga mempengaruhi kelancaran aktivitas perekonomian sehari - hari warga masyarakat, khususnya bila jalur transportasi darat dalam memasok bahan kebutuhan pokok. Barang - barang yang lewat jalur darat sering

di sweeping oleh aparat (TNI - Polri) ataupun GAM, dan seperti ada iuran (Rp 20.000 - Rp 100.000) untuk barang - barang yang akan lewat. Warga juga sering terperangkap dalam konflik bersenjata. Kecurigaan antar kesatuan sosial (TNI - Polri / GAM) pada warga / kendaraan / angkutan umum / barang / pribadi sekalipun yang melintas pos - pos pemeriksaan juga membuat perasaan aman / tidak aman bagi warga masyarakat. Aktivitas ekonomi juga berlangsung di siang hari tetapi tidak pada malam hari. Salah satu informan menceritakan: *“Bahwa perusahaan tempat ia bekerja sebagai supervisor dalam sebuah perusahaan terkena dampak langsung ketidakamanan. Kami tidak berani lagi membuka hiburan sampai malam hari pukul 22.00 malam, kita sudah tutup”*.

Propaganda yang dilakukan oleh GAM diantaranya mengatakan, *“kalau Aceh merdeka, kita pasti makmur. Aceh ini berlimpah rahmat Tuhan. Kemerdekaan artinya pisah dengan negara Republik Indonesia”* Berdasarkan salah satu informan yang berasal dari aparat (TNI - Polri) mengatakan, bahwa *“Warga lebih takut dengan GAM daripada dengan TNI/Polri, karena GAM benar - benar akan membunuh, mencekik kerabatnya. Tetapi kalau TNI/Polri, paling - paling dipukuli / dirontokkan giginya. Sehingga warga takut kalau terang-terangan melapor (mengenai GAM) kepada TNI/Polri”*.

Bagi warga, peperangan antara TNI/Polri dengan GAM kondisinya sangat menyusahakan warga. Bagi kaum perempuan korban, aman diartikan bisa bekerja dengan tenang, tidak ada kekacauan, tembak menembak, kekerasan dan pembunuhan. Bagi Suarni (30 tahun), aman dikaitkan dengan tegaknya hukum di Aceh. Sebab bersalah tidaknya seseorang mesti diputuskan lewat pengadilan tidak sebagaimana suaminya yang menjadi korban fitnah. Dalam lain kata, maksud Zulbaidah (31 tahun), janda menanggung 5 anak, penembak suaminya harus dihukum, kalau tidak maka anaknya akan semakin dendam terhadap TNI. Lain halnya dengan Rosnidar (27 tahun) yang menyatakan : *“orang yang berebut pangkat, rumah kami yang dibakar”*.

Bagi perempuan non korban, rasa aman diartikan bisa bebas kembali mencari nafkah, Rida seorang ibu rumah tangga menjelaskan: *“Yang penting bagi saya hilang rasa takut dan khawatir kalau lihat terjadi kontak. Saya menjadi teringat anak-anak yang di sekolah atau lagi bermain. suami saya yang di Jawa, tidak saya izinkan pulang ke sini. Karena saya takut kalau nanti diambil hanya karena salah nama atau karena salah menjawab pertanyaan”*. Rasa aman berarti bisa ke ladang dan ke laut. Aman berarti serdadu tidak sembarangan membakar rumah rakyat tidak memukul rakyat dan ada hukum yang berlaku yang melindungi rakyat, tidak ada lagi intimidasi/teror baik dari aparat atau GAM.

Kadang kala, menurut Zari posisi masyarakat menjadi sangat terjepit. Di satu pihak, TNI dan Polri mengharuskan rakyat melapor bila bertemu dengan GAM, jika tidak dilabel GAM dan diambil tindakan tegas. Di sisi lain, GAM menganggap siapa yang melapor kepada TNI, atau Polri adalah cuak (mata-mata yang mengkhianati perjuangan bangsa Aceh). Bagi anak-anak non korban rasa aman dan pendidikan merupakan kebutuhan yang dominan. Rasa aman dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan suasana belajar yang tenang, tanpa rasa takut. Bahkan rasa aman diartikan adanya kebebasan untuk bermain, sebab selama ini orang tua sering melarang anak-anak untuk

bebas bermain karena situasi keamanan yang secara tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat buruk.

Ada anak-anak korban yang memahami rasa aman dalam artian TNI tidak lagi melakukan sweeping di jalan-jalan. Bahkan anak non korban menjadikan ketakutan bila melihat serdadu yang membawa senjata dan menurut orang-orang itu (aparatus) jahat dan kejam. Keterangan salah satu warga yang menjadi informan, "Masyarakat merasa terjepit melihat GAM takut dan melihat aparat keamanan takut, selalu merasa was-was. Tetapi kami lebih takut dengan GAM, karena kalau dianggap tidak patuh dirinya maupun keluarganya terancam. Kalau dengan aparat paling hanya dipukuli". Pada saat penelitian ini dilakukan, masyarakat Aceh kebanyakan mempunyai stereotip negatif terhadap aparat, kalau ada aparat datang mereka langsung bubar atau menghindar.

Mereka juga berusaha sebisa mungkin tidak ketemu dengan aparat. Tetapi kalau ramai-ramai di kedai dan banyak orang mereka berani, namun kalau sendirian dia takut, karena yang sering berhubungan dengan aparat dijadikan Target operasi (TO) oleh GAM. Masyarakat juga merasa polisi tidak bisa melindungi dirinya secara terus-menerus. Kalau polisi sudah dianggap sebagai kawan (istilahnya orang kita) akan mendapat dukungan dan dibela oleh masyarakat. GAM pada dasarnya adalah manusia, mereka tidak menyamaratakan aparat keamanan semuanya jelek, mereka juga melihat orangnya. artinya ada yang dianggap baik, ada juga yang dianggap jelek baik dari pihak TNI/Polri ataupun GAM.

Masyarakat transmigran pada umumnya berdasarkan cerita-cerita dari Informan, diancam dan diteror oleh GAM untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Teror yang dilakukan secara bertahap yang paling parah dengan melakukan pembakaran, penculikan, dan pembunuhan warga transmigrasi. Saat itu warga transmigrasi sebanyak 300 KK dengan adanya teror tersebut hanya tinggal 20 KK, dan setelah adanya pengamanan dari polisi (pos Brimob tahun 2002) mereka yang lari mulai berdatangan kembali. Pada saat terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh, banyak rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan dijadikan penampungan para pengungsi korban tsunami.

Di penampungan ini warga transmigran mempunyai ikatan kekerabatan yang kuat antar sesama anggota yang berlainan suku terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Aceh. "Daerah transmigrasi Jantho merupakan daerah trans yang berhasil, hal ini terlihat dari bangunan yang tadinya dari papan-papan kayu sekarang hampir semua rumah telah terbuat dari beton. Hasil pertanian seperti buah-buahan cukup melimpah. Namun sekitar tahun 2001 ada sekelompok GAM masuk ke daerah ini dan mereka meminta jatah uang dan mereka mengancam serta mengusir orang-orang Jawa meninggalkan Aceh. Saat itu ada beberapa rumah di sini oleh GAM dirusak dan dibakar, sehingga warga ketakutan dan pulang ke Jawa.

Tapi saat ini orang-orang yang pergi ke Jawa sebagian sudah datang kembali. Dahulu kami sangat takut sekali, sehabis maghrib tidak berani keluar rumah." Sesama warga trans walaupun berbeda suku bangsa mereka merasa satu keluarga. Di sini sudah banyak yang menikah silang antara orang Jawa dengan orang Aceh dan seterusnya. Sehingga di beberapa titik wilayah kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi. Ketika

terjadi bentrokan, GAM juga menggunakan para ulama untuk mempropagandakan kemerdekaan Aceh, dan saat terjadi kontak senjata setiap ada korban dari pihak GAM dan tidak ada bukti senjata para ulama akan menyuarakan kritik bahwa TNI/Polri telah melakukan tindakan pelanggaran HAM/kemanusiaan atau saat ada penyerangan GAM menggunakan masyarakat sebagai tamengnya.

Masyarakat menurut polisi merasa lebih takut dengan GAM dan menginginkan tidak adanya kontak senjata yang melibatkan masyarakat, namun GAM selalu melibatkan masyarakat. Menurut informasi, ada daerah-daerah di Aceh terutama di Aceh tengah, ada yang masyarakatnya berani melakukan perlawanan terhadap GAM, karena mereka juga mempunyai senjata dan mereka terdiri dari berbagai suku bangsa Padang, Batak dsb. Apabila salah satu dari keluarga mereka disandera GAM, maka mereka juga melakukan penyanderaan terhadap anggota GAM dan dilakukan barter. Hal demikian yang tidak mungkin dilakukan oleh polisi yang aksesnya terhadap pelanggaran HAM sudah pasti terbatas. Saat sweeping / penyisiran dilakukan oleh anggota TNI/Polri, kerap beberapa kali anggota menjadi korban penikaman GAM.

Dari data dan deskripsi yang kami peroleh di atas ini maka terdapat beberapa wawasan penting yang dapat kami uraikan. Yang pertama, Gerakan Aceh Merdeka / GAM mencoba untuk memprovokasi dan melakukan propaganda pada masyarakat Aceh untuk mendiskreditkan serta mendelegitimasi pemerintahan Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka pada dasarnya fokus untuk memberikan advokasi dan menimbulkan perlawanan pada masyarakat Aceh, tetapi tidak termasuk di dalamnya adalah mereka yang merupakan warga masyarakat di Aceh tetapi memiliki atribut kesukubangsaan Padang, Batak (Sumatera Utara), Riau dan lain sebagainya kecuali suku bangsa Jawa.

Suku bangsa Jawa dianggap sebagai representasi dari TNI - Polri yang ada di Aceh dan juga para transmigran (Jawa) yang tinggal dan hidup sebagai satu kesatuan masyarakat di Aceh. Kedua, Pandangan negatif atau dalam antropologi khususnya hubungan antar suku bangsa disebut dengan stereotip berimplikasi signifikan kepada mereka yang bukan - Aceh khususnya suku Jawa di Aceh. Ketiga, TNI / Polri dalam melakukan penindakan dan pengejaran terhadap warga masyarakat di Aceh terbagi menjadi dua bagian yakni warga masyarakat yang terafiliasi dengan GAM dan warga masyarakat yang terafiliasi bukan-GAM. GAM biasanya merupakan warga dari Suku Aceh, dan bukan-GAM biasanya terafiliasi pada suku Jawa, Aceh, Padang, Batak, Riau, Sunda dan lainnya.

Warga masyarakat yang tidak terafiliasi GAM jumlahnya lebih banyak dan sering kali menjadi korban (diduga GAM). Mereka ini yang menjadi korban seringkali merupakan dampak sampingan yang memperburuk hubungan relasional antara GAM, TNI - Polri dan Warga Masyarakat. Hal ini membuat warga masyarakat menjadi trauma dengan kondisi lingkungan sosial - politik serta keamanan di Aceh karena sering dijadikan kuda hitam / bempet dari pihak GAM, tetapi juga mengalami teror dari GAM begitu juga mengalami pemeriksaan, intimidasi dari pihak TNI - Polri karena disangka sebagai GAM padahal bukan-GAM. Hal ini juga memperparah kondisi lingkungan sosial - politik dan keamanan di Aceh.

Keempat, GAM mencari warga masyarakat yang merupakan cuak atau intel dari TNI - Polri yang memberikan informasi terhadap keberadaan GAM. Sedangkan TNI - Polri mencari warga masyarakat yang terafiliasi dengan GAM. Warga kerap menjadi korban dari konflik dan latar sosial yang terjadi di Aceh. Kondisi ini membuat warga begitu takut untuk bertindak dan cenderung untuk menghindari TNI - Polri maupun GAM.

Kesimpulan

Ketidakadilan akibat perbedaan perlakuan ekonomi menjadi penyebab yang mengakibatkan terjadinya ekses-ekses kemanusiaan yang tidak dapat dihindari dari latar sosial dan konteks ini adalah jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa, pengungsian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan yang terjadi paling banyak pada warga masyarakat. Kondisi ini dapat dihindari dengan penelusuran lebih mendalam terhadap masyarakat aceh tentang siapa yang benar - benar GAM dan siapa yang bukan-GAM (apapun sukubangsanya). Kerugian moril, jiwa dan materiil jelas terjadi di Aceh dalam konteks relasional antara GAM, Masyarakat dan TNI - Polri. Jelas bahwa penanganan utama yang hendak dilakukan dalam menangani ini adalah adanya counter wacana terhadap wacana - wacana propaganda yang berkembang.

BIBLIOGRAFI

- Hidayat, Amri Wahid, Herdiansyah, Ari Ganjar, & Sumadinata, R. Widya Setiabudi. (2021). Peran Elite Dalam Rekrutmen Eks-Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Dan Dampaknya Terhadap Pelembagaan Partai Aceh Pasca Pemilu 2019. *Journal of Political Sphere*, 2(1), 1–14.
- Cicourel, Aaron V. (1968), "The Social Organization of Juvenile Justice", New York, Wiley
- Kumalasari, Reni. (2021). Relasi Agama Dan Politik Di Aceh Pasca Konflik; Pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka. *Jurnal Adabiya*, 23(1), 1–18.
- Karandinos, George, Laurie Kain Hart, Fernando Montero Castrillo, and Philippe Bourgois. 2014. "APA PsycNet." The Moral Economy of Violence in the US Inner City. 55 (1). <https://psycnet.apa.org/record/2014-10321-001>.
- Mahardika, Pustaka. (2015). *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Mills, C. W. (1959). The sociological imagination. *the Mississippi Valley Historical Review*, 46(2), 355. <https://doi.org/10.2307/1891592>
- Nurcahya, Mila Andriani, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-Hari. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 631–639.
- Nurhasim, Moch. (2016). Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 85–98.
- Schulze, Kirsten E. (2003). The struggle for an independent Aceh: The ideology, capacity, and strategy of GAM. *Studies in Conflict and Terrorism*, 26(4), 241–271. <https://doi.org/10.1080/10576100390209304>
- Shindyawati, Shindyawati. (2019). Desentralisasi dalam integrasi nasional studi kasus: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Gerakan Pemberontak Moro di

- Filipina. *The Indonesian Journal Of Politics and Policy (IJPP)*, 1(1), 32–40.
- Sinaga, Fransiska Adelina. (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam Menanggulangi Aksi Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 237–247.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara.
- Syaftina, Suci. (2018). *Peran Crisis Management Initiative dalam Upaya Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Suparlan, Parsudi. 2005. Ilmu Kepolisian. Edited by Chryshnanda DL and Yulizar Syafri. 1st ed.
- Wulandari, Sri, Mahyuzar, Drs, & Si, M. (2019). Strategi Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh dalam Mensosialisasikan Informasi Wajib Pajak Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(4), 1–15.

Copyright holder:

Bakharuddin Muhammad Syah (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

